

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan sistem keuangan *modern*, proses akuntansi juga harus banyak mengalami peningkatan. Masyarakat umum selaku pengguna informasi keuangan semakin menuntut atas peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Maka dari itu, pemerintah harus selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan guna pengambilan keputusan bagi pengguna informasi laporan keuangan.

Karena banyaknya tuntutan yang ditujukan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka pemerintah pun mengambil tindakan yang disebut akuntabilitas publik. Menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Walaupun pemerintah sudah mengadakan proses akuntabilitas publik, tapi banyak oknum-oknum pemerintah yang pada akhirnya membuat masyarakat tetap banyak menuntut akan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah akibat dari pemerintahan yang kurang baik.

Pentingnya membuat pemerintahan yang baik dan bersih akan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, maka akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik (Rahman, 2017:4).

Selain dari segi komitmen organisasi, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dalam penyusunannya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan

keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain dari memahami aturan yang ada, SDM pun harus memiliki sikap dan perilaku yang baik guna menghindari adanya kasus kecurangan. SDM merupakan pilar penyangga utama dalam membantu penyelenggaraan pemerintah yang bersangkutan. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, maka semakin memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sehubungan dengan keterkaitan di atas, ada pula penelitian-penelitian terdahulu yang telah meneliti hubungan-hubungan variabel yang seperti penulis ambil, baik itu analisis faktor dari variabel, hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan, ataupun hubungan antara komitmen organisasi dengan kualitas laporan keuangan. Salah satunya adalah penelitian dari I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014), yang meneliti tentang faktor-faktor dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Gianyar. Dimana penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil pendapat bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin berkompeten SDM yang ada maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Ada juga penelitian dari Ida Ayu dan Ni Made Adi (2016), yang melakukan penelitian serupa. Menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Tetapi adapula penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syarifudin (2014), yang salah satunya meneliti tentang kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Pariaman. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya meningkatnya variasi kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD. Dari kedua penelitian ini dapat terlihat bahwa

Ani Rismayanti, 2019

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hanya saja berpengaruh secara signifikan atau tidak dapat diteliti berdasarkan wilayah penelitian masing-masing.

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Rivaldy dkk (2018), yang meneliti tentang pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintahan Kota Manado. Kesimpulannya menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh pegawai, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Selain itu, penelitian dari Siriyama dan Norah (2017), dalam penelitiannya mengenai *Financial Reporting Quality* di Atlanta mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dikaitkan dengan berbagai macam faktor, salah satunya adalah budaya organisasi, dimana budaya organisasi ini akan mencerminkan perilaku seseorang dalam organisasi. Perilaku ini dapat ditunjukkan dengan komitmen organisasi yang cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Qingliang Tang dkk (2016), dalam jurnal *Financial Reporting and Accounting*, yang menyatakan bahwa untuk meneliti kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi dapat dijadikan objek penelitian. Karena ada banyak hal yang dapat memungkinkan laporan keuangan menjadi berkualitas, salah satunya adalah komitmen organisasi.

Selain daripada penelitian-penelitian terdahulu, fakta di lapangan yang berhubungan dengan variabel yang penulis ambil dapat dibuktikan dengan adanya fenomena mengenai kualitas laporan keuangan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimana laporan keuangan yang diterima KBB masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Pada tahun 2011, untuk pertama kalinya KBB mendapatkan opini WDP dari sebelumnya mendapatkan *disclaimer*. Permasalahan yang terjadi adalah seputar belum tuntasnya pelimpahan aset dari Kabupaten induk ke KBB dan juga administrasi yang berhubungan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya, mengatakan bahwa aset yang dilimpahkan dari Pemkab Bandung yaitu sekitar

Ani Rismayanti, 2019

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Rp732 miliar ke KBB tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai yang tercatat. (Sintia, 2012)

Pada tahun 2012 – 2013, Kabupaten Bandung Barat masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Permasalahan yang dibahas masih sama, yaitu lantaran dokumen pelimpahan aset yang kurang lengkap saat pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung. (Rahmat, 2016)

Pemkab Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jabar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014. Menurut Bupati Bandung Barat H Abubakar, opini tersebut diraih karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama, menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. (Agus, 2015)

Selanjutnya, Pemkab Bandung Barat meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara Sutisna menilai bahwa pengelolaan aset merupakan permasalahan utama Pemkab Bandung Barat dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama delapan tahun lebih persoalan aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat tak kunjung dapat diselesaikan. Dikatakan bahwa aset yang tersertifikasi masih sedikit dibandingkan dengan aset tanah yang belum tersertifikasi. (Oche, 2016)

Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus puas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya, menuturkan penyebab gagalnya Pemkab meraih opini WTP pada LKPD masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya adalah mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan. (Cecep, 2017)

Ani Rismayanti, 2019

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Masalah tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Tahun 2017, KBB masih menerima opini WDP dari BPK. Permasalahan bertambah dengan ditemukannya persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian.

Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan KBB Kholid Nurjamil mengatakan bahwa Pemkab harus meningkatkan terus kualitas atau kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, mereka akan mampu membuat laporan sesuai dengan kegiatan sesungguhnya, dan juga memiliki pemahaman terhadap peraturan sehingga akan ada kepatuhan. (Mukhlis, 2018)

Dari fenomena di atas, kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti tidak sesuai pembukuan dengan *real*-nya, pencatatan aset yang berbeda dengan yang di catat, dan lain sebagainya. Selain dari itu, Kholid Nurjamil juga mengatakan bahwa dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, maka SDM tersebut akan semakin memiliki pemahaman terhadap peraturan sehingga akan ada kepatuhan.

Menurut Septiani (2005) dalam Rahman (2017:5), kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku patuh di dalam proses sosialisasi individu dimana seseorang cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, norma-norma ini dibagi dua, yaitu ada yang disebut dengan komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*), yang artinya adalah mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan. Yang kedua adalah komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*), artinya mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku individu tersebut. Dengan demikian, adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Kurangnya komitmen organisasi seseorang dapat dilihat dari kasus korupsi yang menimpa Kabupaten Bandung Barat. Dinyatakan bahwa mantan Bupati Bandung Barat yaitu Abu Bakar, terlibat dalam kasus korupsi bersama dengan beberapa aparatur daerah di SKPD Kabupaten Bandung Barat. (Adi, 2018)

Dengan adanya kasus ini, maka tercerminlah sikap dan perilaku dari para pejabat pemerintah, dimana dapat terlihat bahwa para pelaku korupsi memiliki komitmen organisasi yang rendah. Artinya, orang-orang ini lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding tujuan organisasi. Dimana salah satu tujuan pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengeualian dari BPK.

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis ungkapkan di atas, penulis tertarik meneliti kembali mengenai komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia, dimana salah satunya kompetensi SDM ini memiliki perbedaan hasil penelitian seperti yang sudah penulis paparkan di atas. Dengan didukung fenomena-fenomena yang penulis temukan di KBB, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh:

1. Komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh komitmen organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya komitmen organisasi dan pentingnya perangkat daerah agar pemerintahan yang bersangkutan dapat memiliki kualitas laporan keuangan yang baik. Bagi aparatur pemerintah daerah selaku aparat diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin bagi daerahnya, serta memberikan sikap yang patut di contoh dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah.